



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MUKOMUKO**

BIDANG PSDKP
SEKSI PENGAWASAN, PERIZINAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Plt. Kepala Dinas, <u>Toyeb, A.Md</u> Pembina NIP.196006121986031018
Nama SOP	Operasi Terpadu Pencegahan <i>Illegal Fishing</i>

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pemahaman tentang Fishing ground, alat tangkap dan dokumen administrasi alat penangkapan ikan.2. Memiliki kemampuan pemahaman tentang penerapan hukum tentang perikanan.3. Memiliki keahlian khusus tentang penanganan pelanggaran penangkapan ikan
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
Kepolisian Resort Mukomuko TNI AL Pos Mukomuko Bag. Hukum Setda Kab.Mukomuko	<ol style="list-style-type: none">1. Alat tulis Kantor, Printer, Komputer.2. Buku Agenda3. Armada operasi/speedboat4. Peralatan keamanan operasi (jaket pelampung, senjata, lifebouy)5. Personil Tim Operasi
Peringatan	Pencatatan/Pendataan
Jika tidak disusun, maka operasi terpadu akan kesulitan dilaksanakan sehingga pencapaian hasil tidak maksimal.	Seksi pengawasan, perizinan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan						Mutu Waktu			Ket
		KepalaDinas	Kabid PSDKP	Kasi was	Ketua TIM	Bag. Hukum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1	Permintaan Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dari Bidang PSDKP, Polres dan TNI AL	mulai						Buku Agenda	7 Hari	Tercatatnya Surat Permintaan	
2	Pengetikan draf SK tim terpadu pencegahan dan pemberantasan illegal fishing					tidak		Surat Balasan Dasar Hukum pelaksanaan	3 Hari	Draf SK TIM	
3	Verifikasi SK dan Penandatanganan							Draf SK	4 Hari	SK TIM	
4	Pendistribusian SK Kepada Anggota TIM					ya		Buku Agenda SK TIM	1 Hari	Expedisi surat keluar	
5	Mengundang tim terpadu untuk rapat penentuan jadwal operasi							Surat undangan	1 Hari	Expedisi surat keluar	
6	Pelaksanaan rapat penentuan jadwal operasi							Bahan laporan pokmaswas	1 Hari	Dokumen jadwal	
7	Pembekalan tim operasi oleh ketua tim terpadu							Jumlah anggota, panduan operasi	2 Jam	Personel dan armada yang siap pakai	
8	Pemeriksaan kesiapan personel dan armada operasi oleh ketua tim terpadu							Jumlah anggota, armada, alat keselamatan dan Akomodasi	2 Jam	Personel dan armada yang siap pakai	
9	Pelaksanaan operasi terpadu oleh tim operasi							Armada dan personel	1 Hari	Hasil operasi	
10	Pendokumentasian operasi							Kamera	1 Hari	Dokumentasi operasi	
11	Pelaksanaan rapat pembahasan hasil operasi terpadu							Hasil dan dukumentasi operasi	1 Hari	Tindakan yang harus ditindaklanjuti	
12	Penyusunan laporan operasi terpadu							Hasil dan dukumentasi operasi	3 Hari	Buku laporan	

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBUATAN PROSES OPERASI TERPADU ILLEGAL FISSING